



# **PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**



## **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023**



## **DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 63 Lamongan 62217  
Telp./Fax. (322 316147  
Email : [disnaker@lamongankab.go.id](mailto:disnaker@lamongankab.go.id)  
Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik.

RENJA PD Tahun 2023 ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

RENJA PD Tahun 2023 ini memuat Program dan Kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas ke depan dengan mengantisipasi perkembangan mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA PD Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan RENJA PD Tahun 2023.

Sekian dan terima kasih.

Lamongan, Juli 2022

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN LAMONGAN**



**AGUS CANYONO, S.E., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650808 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I       PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	2
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 SISTIMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II       EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD.....	6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD.....	22
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD.....	24
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	25
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	39
BAB III      TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	40
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI.....	40
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD.....	42
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	44
BAB IV      RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	48
BAB V       PENUTUP.....	61
5.1 KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN.....	61
5.2 RENCANA TINDAK LANJUT.....	61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Pemerintah Kabupaten Lamongan membentuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan No. 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

DINAS TENAGA KERJA Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kebijakan teknis dan strategis;
2. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas KEPALA DINAS TENAGA KERJA Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

1. Perumusan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, dan LKPJ Dinas.
2. Perumusan dan penetapan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas.
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi Kesekretariatan, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas, Pelatihan Kerja, Transmigrasi serta Unit Pelaksanaan Teknis dan Jabatan Fungsional.
4. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
5. Penyelenggaraan fasilitas program Kesekretariatan, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas, Pelatihan Kerja, Transmigrasi serta Unit Pelaksanaan Teknis dan Jabatan Fungsional.

6. Penyampaian laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah Daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
7. Pembinaan administrasi dinas di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
8. Pengorganisasian dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaraan pelaksanaan kegiatan Dinas.
9. Penyelenggara fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan, sehingga berdampak kepada penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran baik dari sisi proses, mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundangan-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana berikut :

- 1) RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
- 2) RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, kondisi umum yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun Kabupaten;
- 3) Renstra PD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;
- 4) Renja PD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra PD dan



memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;

- 5) RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja PD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan idiil dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1)
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
  12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
  13. Peraturan Bupati Nomor 188 Tahun 2018 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
  14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor: 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.
  15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Setrategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026
  16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022
  17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor: 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023
  18. Keputusan Bupati Lamongan Tanggal 29 Juli 2022 Nomor : 188/245/KEP/413.013/2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Akhir (Renja Rankhir PD) dimaksudkan agar Pola Pembangunan yang akan dilakukan oleh sebuah instansi dapat dijalankan secara sistematis, teratur, terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendukung sehingga dampak yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir dan diantisipasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Rancangan Akhir (Renja Rankhir PD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lamongan.
- 2) Menetapkan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam satu tahun sebagaimana diuraikan dalam RENSTRA PD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, yang menjadi Pedoman Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan sehingga hasilnya dapat dicapai dan diukur secara komprehensif dan obyektif.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II      HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III     TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV     RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V      PENUTUP**

- 5.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan
- 5.2 Rencana Tindak Lanjut



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU TAHUN 2021

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021) DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

- Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan terdiri dari 4 Program dan 17 Kegiatan dengan total Anggaran pada Tahun 2021 sejumlah Rp 8.214.783.353,- terealisasi Rp 6.282.910.495,- (76,48%), belum terserap Rp 1.931.872.858,- (23,52%), penyerapan anggaran disesuaikan dengan cash budget.

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu  
dan Capaian Renja PD (Tahun 2021)

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
	<b>KETENAGAKERJAAN</b>	<b>8.214.783.353</b>	<b>6.282.910.495</b>	<b>76,48</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.315.195.353</b>	<b>4.858.177.319</b>	<b>91,40</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100.000.000</b>	<b>91.233.900</b>	<b>91,23</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	16.129.600	80,65
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	75.104.300	93,88
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.631.249.853</b>	<b>3.369.069.044</b>	<b>92,78</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.607.249.853	3.359.674.794	93,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.000.000	4.211.450	35,10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.000.000	5.182.800	43,19
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>47.500.000</b>	<b>47.396.300</b>	<b>99,78</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47.500.000	47.396.300	99,78
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>93.298.000</b>	<b>82.867.100</b>	<b>88,82</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.798.000	39.798.000	100

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000	8.155.500	65,24
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	8.660.000	78,73
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	16.253.600	81,27
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-
	Pengadaan Mebel		-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.132.865.500</b>	<b>988.681.375</b>	<b>87,27</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287.229.200	200.756.635	69,89
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.808.300	52.650.000	94,34
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	789.828.000	735.274.740	93,09
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>310.282.000</b>	<b>278.929.600</b>	<b>89,90</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	52.734.900	65,92
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	17.694.700	88,47
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.282.000	208.500.000	99,15
<b>2</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>2.445.190.000</b>	<b>1.171.283.800</b>	<b>47,90</b>
	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>2.395.190.000</b>	<b>1.164.728.800</b>	<b>48,63</b>
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.395.190.000	1.164.728.800	48,63
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	-
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	-	-	-

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>15.000.000</b>	<b>3.840.000</b>	<b>25,60</b>
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.000.000	3.840.000	25,60
	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>15.000.000</b>	-	-
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	15.000.000	-	-
	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>20.000.000</b>	<b>2.715.000</b>	<b>13,58</b>
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	20.000.000	2.715.000	13,58
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>344.398.000</b>	<b>165.827.876</b>	<b>48,15</b>
	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.000.000</b>	<b>33.376.500</b>	<b>55,63</b>
	Pelayanan antar Kerja	30.000.000	29.500.000	98,33
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	30.000.000	3.876.500	12,92
	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>209.398.000</b>	<b>97.272.000</b>	<b>46,45</b>
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	30.000.000	17.874.000	59,58
	Job Fair/Bursa Kerja	179.398.000	79.398.000	44,26
	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>70.000.000</b>	<b>30.709.376</b>	<b>43,87</b>
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	32.000.000	23.768.500	74,28
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	17.000.000	6.940.876	40,83
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	21.000.000	-	-
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.470.000	89,40
<b>4</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>110.000.000</b>	<b>87.621.500</b>	<b>79,66</b>
	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>48.000.000</b>	<b>46.254.100</b>	<b>96,36</b>
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	30.000.000	28.851.600	96,17
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	18.000.000	17.402.500	96,68

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>62.000.000</b>	<b>41.367.400</b>	<b>66,72</b>
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.000.000	13.050.400	40,78
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000	17.231.000	95,73
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	11.086.000	92,38

- Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan total Anggaran pada Tahun 2021 sejumlah Rp 40.000.000,- terealisasi Rp 17.519.600,- (43,80%). Belum terserap Rp 22.480.400,- (56,20%), penyerapan anggaran disesuaikan dengan cash budget

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu  
dan Capaian Renja PD (Tahun 2021)

No	Program dan kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	(%)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>40.000.000</b>	<b>17.519.600</b>	<b>43,80</b>
	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.000.000</b>	<b>17.519.600</b>	<b>43,80</b>
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000	876.600	10,44
	Penyuluhan Transmigrasi	31.600.000	16.643.000	52,67

Tabel T-C.29  
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Lamongan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD SID Dengan Tahun 2022 (Tahun Berjalan/n-1)	
													Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Disnaker	83	-	-	-	-	79	-	-
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	110 dokumen	-	22 Dokumen	22 Dokumen	100%	22 dokumen	-	-
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen RKPD	10 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	-	-
						Jumlah dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah	15 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	-	-
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja (CAPKIN, IKI dan SAKIP)	60 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	-	-
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Informasi dan Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
						Jumlah Dokumen (LPPD, LKPJ, LKJiP dan IKM)	20 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD SID Dengan Tahun 2022 (Tahun Berjalan/n-1)	
													Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	35 orang	-	35 orang	35 orang	100%	35 orang	-	-
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	15 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	-	-
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran tepat waktu	15 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	-	-
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik Tradisional	300 orang	-	-	-	-	60 orang	-	-
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	30 orang	-	-	-	-	6 orang	-	-
						Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan untuk Jabatan Fungsional tertentu	10 orang	-	-	-	-	2 orang	-	-
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD SID Dengan Tahun 2022 (Tahun Berjalan/n-1)	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	18 alat listrik	-	18 jenis alat listrik	17 jenis alat listrik	94,44%	18 alat listrik	-	-
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	135 ATK	-	47 ATK	47 ATK	100%	27 ATK	-	-
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	20 cetakan	-	5 cetakan	5 cetakan	100%	4 cetakan	-	-
						Jumlah foto copy	43.180 lembar	-	17.036 lembar	-	-	8.636 lembar	-	-
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	2 jenis bahan bacaan	-	2 jenis bahan bacaan	2 jenis bahan bacaan	100%	2 jenis bahan bacaan	-	-
						Jumlah iklan	1 iklan	-	1 iklan	-	-	1 iklan	-	-
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1.240 box nasi, 1.240 box snack	-	200 box nasi, 200 box snack, 3 botol besar air mineral, 15 dus air minum sedang, 45 dus air gelas, 60 galon air mineral	198 box nasi, 198 box snack, 3 botol besar air mineral, 15 dus air minum sedang, 16 dus air gelas, 19 galon air mineral	85,85%	248 box nasi, 248 box snack	-	-
						Jumlah makanan dan minuman Tamu yang disediakan	150 dus air minum sedang, 240 botol minum besar, 240 galon air mineral, 300 dus air gelas	-				30 dus air minum sedang, 48 botol minum besar, 48 galon air mineral, 60 dus air gelas	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD SID Dengan Tahun 2022 (Tahun Berjalan/n-1)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
						Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	620 perjalanan	-	22 perjalanan	8 perjalanan	36,36%	124 perjalanan	-	-
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur	10 meja komputer dan 20 kursi hadap	-	-	-	-	2 meja komputer dan 4 kursi hadap	-	-
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	10 komputer, 5 laptop dan 5 printer	-	-	-	-	2 komputer, 1 laptop dan 1 printer	-	-
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	4 rekening	-	3 rekening	3 rekening	100%	4 rekening	-	-
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik	80 Komputer, 110 Printer, 125 AC	-	24 Komputer, 31 Printer, 41 AC	22 Komputer, 28 Printer, 41 AC	94,79%	16 Komputer, 22 Printer, 25 AC	-	-
						Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara dengan baik	5 kursi tamu, 10 sound system dan 45 unit tabung apar	-	2 soundsystem, 2 kursi tamu, 8 unit tabung apar	2 soundsystem, 2 kursi tamu, 8 unit tabung apar	100%	1 kursi tamu, 2 sound system dan 9 unit tabung apar	-	-
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah cleaning service	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD SID Dengan Tahun 2022 (Tahun Berjalan/n-1)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
						Jumlah JKK/JKM	30 Orang	-	29 Orang	29 Orang	100%	30 Orang	-	-
						Jumlah premi asuransi kesehatan	30 Orang	-	29 Orang	29 Orang	100%	30 Orang	-	-
						Jumlah tenaga administrasi perkantoran	26 Orang	-	24 Orang	24 Orang	100%	26 Orang	-	-
						Jumlah tenaga keamanan	4 Orang	-	5 Orang	5 Orang	100%	4 Orang	-	-
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2 unit kendaraan roda 4	-	2 unit kendaraan roda 4	1 unit kendaraan roda 4	50%	2 unit kendaraan roda 4	-	-
						Jumlah pajak surat kendaraan yang terbayarkan	1 kir, 5 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2	-	1 kir, 5 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2	2 unit kendaraan roda 2	12,50%	1 kir, 5 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2	-	-
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 unit kendaraan roda 4, 10 unit kendaraan roda 2	-	4 unit kendaraan roda 4, 10 unit kendaraan roda 4	2 unit kendaraan roda 4	14%	4 unit kendaraan roda 4, 10 unit kendaraan roda 2	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD SID Dengan Tahun 2022 (Tahun Berjalan/n-1)	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	-	3 gedung	3 gedung	100%	1 paket	-	-
2	07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja	88,90%	-	-	-	-	88,86%	-	-
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	-
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	-
2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,39%	-	-	-	-	1,35%	-	-
						Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	48,372%	-	-	-	-	42,978%	-	-
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berdasarkan unit kompetensi	800 orang	-	224 orang	96 orang	42,86%	160 orang	-	-
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (Menjahit, Tata Rias, Processing, Servis Sepeda Motor, Mekanik Mobil Bensin/Diesel, Teknik Pendingin/AC dan Las Listrik)	800 orang	-	240 orang	96 orang	40%	160 orang	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD SID Dengan Tahun 2022 (Tahun Berjalan/n-1)	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah lulus pendidikan dan pelatihan bersertifikat kompetensi	5 orang	-	-	-	-	1 orang	-	-
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pelatihan (1 Scanner dan 2 Printer)	15 Buah	-	-	-	-	3 Buah	-	-
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi	250 LPK	-	42 LPK	-	-	50 LPK	-	-
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang memiliki perizinan	250 LPK	-	42 LPK	-	-	50 LPK	-	-
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat	50 orang	-	20 orang	-	-	10 orang	-	-
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi	50 orang	-	20 orang	-	-	10 orang	-	-
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	35 perusahaan kecil	-	7 perusahaan kecil	-	-	7 perusahaan kecil	-	-
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah kompetensi produktifitas tenaga kerja	35 perusahaan kecil	-	7 perusahaan kecil	-	-	7 perusahaan kecil	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD SID Dengan Tahun 2022 (Tahun Berjalan/n-1)	
													Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	76,08%	-	-	-	-	72,30%	-	-
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan Antarkerja	2 pelayanan	-	2 pelayanan	-	-	2 pelayanan	-	-
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	500 orang	-	200 orang	-	-	100 orang	-	-
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah calon Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang dilatih	100 orang	-	-	-	-	20 orang	-	-
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	5.000 pencaker	-	500 pencaker	500 pencaker	100%	1.000 pencaker	-	-
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah analisis pasar kerja mikro	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	-
						Jumlah media promosi informasi pasar kerja	10.000 leaflet, pamflet	-	1.000 Posterleaflet	1.000 Posterleaflet	100%	2.000 leaflet, pamflet	-	-
						Jumlah peserta pembinaan bursa kerja khusus	75 orang	-	-	-	-	15 orang	-	-
						Jumlah peserta sosialisasi informasi pasar kerja	75 orang	-	20 Peserta	-	-	15 orang	-	-



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD SID Dengan Tahun 2022 (Tahun Berjalan/n-1)	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja bertemu dengan pemberi kerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya / Bursa Kerja (JMF) secara online/offline	5.000 pencaker	-	500 pencaker	500 pencaker	100%	1.000 pencaker	-	-
						Jumlah dokumen database pengangguran	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	-	-
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi	340 orang	-	345 orang	-	-	68 orang	-	-
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100 orang	-	-	-	-	20 orang	-	-
						Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	200 orang	-	-	-	-	40 orang	-	-
						Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	40 orang	-	-	-	-	8 orang	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD SID Dengan Tahun 2022 (Tahun Berjalan/n-1)	
													Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarga	100 orang	-	15 orang	-	-	20 orang	-	-
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan perpanjangan IMTA di Kabupaten Lamongan	250 orang	-	50 Orang	29 Orang	58%	50 orang	-	-
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA di Kabupaten Lamongan	250 orang	-	30 Orang	29 Orang	58,00%	50 orang	-	-
2	07	05			<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Persentase perusahaan yang menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan</b>	<b>60,11%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,07%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan	150 perusahaan	-	-	-	-	30 perusahaan	-	-
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendaftarkan PP/PKB dan pembentukan LKS Bipartit	150 perusahaan	-	20 perusahaan	10 perusahaan	50%	30 perusahaan	-	-
						Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan/penyuluhan kepatuhan syarat-syarat kerja	250 perusahaan	-	50 perusahaan	30 perusahaan	60%	50 perusahaan	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD SID Dengan Tahun 2022 (Tahun Berjalan/n-1)	
													Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah kepesertaan BPJS di perusahaan	150 perusahaan	-	-	-	-	30 perusahaan	-	-
						Jumlah peserta pembahasan UMK	80 orang	-	16 Orang	16 Orang	100%	16 orang	-	-
						Jumlah peserta sosialisasi UMK	250 orang		50 Orang	-	-	50 orang	-	-
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan kerja	50 perselisihan	-	10 perselisihan	10 perselisihan	100%	10 perselisihan	-	-
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial	50 perselisihan	-	10 perselisihan	10 perselisihan	100%	10 perselisihan	-	-
						Jumlah peserta sosialisasi UU perselisihan / PPHI	250 orang	-	-	-	-	50 orang	-	-
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring LKS-Tripartit	90 kali	-	-	-	-	18 kali	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD SID Dengan Tahun 2022 (Tahun Berjalan/n-1)	
1					2	3	4	5	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	9	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	64,76%	-	61,70%	-	-	64,72%	-	-
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	50 KK	-	10 KK	-	-	10 KK	-	-
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	50 KK	-	-	-	-	10 KK	-	-
						Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	10 lokasi	-	-	-	-	2 lokasi	-	-
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/ penyuluhan tentang transmigrasi	100 peserta	-	20 Orang	-	-	20 Orang	-	-

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD (TAHUN 2021)**

- 1) Sasaran meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase pencari kerja yang ditempatkan, dimana jumlah pencari kerja yang ditempatkan 2.716 orang sedangkan jumlah pencari kerja yang mendaftar 3.700 orang. Realisasi kinerja Tahun 2021 sebesar 73,41%.
  - b. Jumlah calon tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi, pada Tahun 2021 sebanyak 96 orang, target RPJMD sebanyak 240 orang dengan capaian 40 %.
  - c. Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dimana jumlah perselisihan hubungan industrial yang tertangani sebanyak 6 kasus sedangkan jumlah perselisihan hubungan industrial yang ada sebanyak 6 kasus, realisasi kinerja 100% karena semua perselisihan dapat terselesaikan.
- 2) Sasaran Meningkatnya Jumlah Calon Transmigran yang Berhasil
  - a. Akibat Pandemi Covid 19 pelaksanaan penempatan transmigran ditunda sehingga Tahun 2021 tidak ada penempatan Transmigran.

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD**  
**Dinas Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Lamongan**

No	INDIKATOR KINERJA	SPM/ Standar Nasional	IKK PP-6/08	TARGET RENSTRA OPD				Realisasi Capaian (%)	Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan		Pelayanan Kebersertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja / Buruh	4,43%	4,82%	5,15%	5,42%	5,10%	-	-	Tidak Terpenuhi
2	Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Terpenuhi
3	Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal		Pencari Kerja yang Ditempatkan	1,12%	1,22%	1,28%	1,51%	40,50 %	-	-	Terpenuhi
4	Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten			1,95%	2,18%	2,40%	2,87%	2,91%	-	-	Terpenuhi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat			-	76	77	78	83,49	79	80	Terpenuhi



### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD**

Kondisi Ketenagakerjaan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja adalah masih tingginya angka pengangguran terbuka setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena terbatasnya lapangan kerja yang tersedia baik formal maupun informal, disamping itu pembukaan lapangan kerja baru disektor swasta belum mampu menyerap tenaga kerja lokal, karena rendahnya kualitas SDM dan banyaknya lulusan SMA/SMK maupun Perguruan Tinggi, sehingga pencari kerja belum mampu terserap dipasar lokal maupun nasional.

Disamping masalah pengangguran, masalah lainnya yang dihadapi adalah tidak adanya pegawai pengawas ketenagakerjaan tingkat Kabupaten, karena sudah ditarik menjadi pegawai provinsi.

Dibidang ketrasmigrasian permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya keseimbangan antara masyarakat yang mendaftar sebagai transmigran dengan calon transmigran yang diberangkatkan, karena pemberangkatan calon transmigran tergantung kuota yang telah ditentukan oleh pusat.

Disamping permasalahan utama di atas permasalahan lainnya yang dihadapi yaitu minimnya tingkat pendidikan peserta transmigrasi, kondisi sarana dan prasarana pemukiman yang kurang memadai sehingga dapat menghambat aksesibilitas dari dan keluar lokasi transmigrasi, hal ini disebabkan belum optimalnya hubungan disektor terkait untuk pengembangan wilayah transmigrasi.

## **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD**

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang telah disusun oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan merupakan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2023 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan. Berikut merupakan tabel penjelasannya.

**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>Nilai IKM Internal DISNAKER</b>	<b>80%</b>	<b>6.640.915.264</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>Nilai IKM Internal DISNAKER</b>	<b>80%</b>	<b>6.640.915.264</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	22 Dokumen	160.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	22 Dokumen	160.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	40.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	120.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	120.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100%	4.392.551.264	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100%	4.392.551.264	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	4.368.551.264	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	4.368.551.264	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3 laporan	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3 laporan	12.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	3 laporan	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	3 laporan	12.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	102.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	102.500.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas BesertaAtribut Kelengkapannya	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	62 paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas BesertaAtribut Kelengkapannya	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	62 paket	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	16 Orang	52.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	16 Orang	52.500.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	154.392.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	154.392.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	18 paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	18 paket	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	27 paket	45.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	27 paket	45.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	11.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	11.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 laporan	68.392.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 laporan	68.392.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	110.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	110.000.000	
	Pengadaan Mebel	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 unit	10.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	14 unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	14 unit	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase penyediaan jasa urusan pemerintah daerah	100%	1.382.472.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase penyediaan jasa urusan pemerintah daerah	100%	1.382.472.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	450.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	450.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	75 laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	75 laporan	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 laporan	892.472.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 laporan	892.472.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	339.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	339.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	85.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	85.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	14 unit	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	14 unit	70.000.000	



No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	184.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	184.000.000	
	<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentasi akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja</b>	<b>88,87%</b>	<b>105.000.000</b>	<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentasi akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja</b>	<b>88,87%</b>	<b>105.000.000</b>	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Penyusunan dokumen evaluasi Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 dokumen	105.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Penyusunan dokumen evaluasi Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 dokumen	105.000.000	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro	35 Perusahaan	105.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro	35 Perusahaan	105.000.000	
	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</b>	<b>1,36%</b>	<b>1.287.245.258</b>	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</b>	<b>1,36%</b>	<b>1.287.245.258</b>	
			<b>Peringkat produktifitas tenaga kerja</b>	<b>44.267</b>				<b>Peringkat produktifitas tenaga kerja</b>	<b>44.267</b>		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Lamongan	Jumlah peserta pelatihan berdasarkan unit kompetensi	160 orang	1.049.495.258	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Lamongan	Jumlah peserta pelatihan berdasarkan unit kompetensi	160 orang	1.049.495.258	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Lamongan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	160 orang	1.026.395.258	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Lamongan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	160 orang	1.026.395.258	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	12.600.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	12.600.000	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	1 unit	10.500.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	1 unit	10.500.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Lamongan	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang memiliki perizinan	50 Lembaga	31.500.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Lamongan	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang memiliki perizinan	50 Lembaga	31.500.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Lamongan	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	50 Lembaga	31.500.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Lamongan	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	50 Lembaga	31.500.000	
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kab. Lamongan	Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat	20 Perusahaan	110.000.000	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kab. Lamongan	Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat	20 Perusahaan	110.000.000	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	110.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	110.000.000	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah perusahaan kecil yang di ukur produktivitas	7 perusahaan kecil	96.250.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah perusahaan kecil yang di ukur produktivitas	7 perusahaan kecil	96.250.000	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	96.250.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	96.250.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota</b>	<b>73,21%</b>	<b>894.476.400</b>	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota</b>	<b>73,21%</b>	<b>894.476.400</b>	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lamongan	Jumlah pelayanan antar kerja	1 Pelayanan	57.750.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lamongan	Jumlah pelayanan antar kerja	1 Pelayanan	57.750.000	
	Pelayanan antar Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang	31.500.000	Pelayanan antar Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang	31.500.000	
	Perluasan kesempatan kerja	Kab. Lamongan	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	20 orang	26.250.000	Perluasan kesempatan kerja	Kab. Lamongan	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	20 orang	26.250.000	Untuk menambah lokasi pelatihan Tenaga Kerja Mandiri
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	2.000 Pencaker	700.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	2.000 Pencaker	700.000.000	
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lamongan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informassi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	150.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lamongan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informassi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	150.000.000	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lamongan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	30 Orang	75.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lamongan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	30 Orang	75.000.000	
	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	2.000 orang	475.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	2.000 orang	475.000.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi	93 Orang	91.726.400	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi	93 Orang	91.726.400	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	30 orang	47.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	30 orang	47.000.000	Berdasarkan UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada calon PMI yang dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah swasta yang terakreditasi
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	48 orang	23.000.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	48 orang	23.000.000	Perlunya menambah anggaran untuk pelayanan dan penanganan PMIB. Proyeksi pada tahun 2023 akan terdapat peningkatan CPMI seiring dengan dibukanya negara penempatan PMI

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Lamongan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	15 Orang	21.726.400	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Lamongan (desa kantong PMI)	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	15 Orang	21.726.400	Terdapat 979 orang PMI yang pulang ke Lamongan pada tahun 2021 (yang terdata di Disnaker) dan tidak bisa kembali bekerja lagi ke luar negeri, sehingga menyebabkan meningkatnya pengangguran
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah penerbitan perpanjangan IMTA di Kabupaten Lamongan	50 Orang	45.000.000	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah penerbitan perpanjangan IMTA di Kabupaten Lamongan	50 Orang	45.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah peserta sosialisasi perusahaan yang mempekerjakan TKA	50 Orang	45.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah peserta sosialisasi perusahaan yang mempekerjakan TKA	50 Orang	45.000.000	
	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>Persentase perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan</b>	<b>60,08%</b>	<b>310.000.000</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>Persentase perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan</b>	<b>60,08%</b>	<b>310.000.000</b>	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	30 perusahaan	80.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	30 perusahaan	80.000.000	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	50 Perusahaan	40.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	50 Perusahaan	40.000.000	
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Lamongan	Jumlah perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30 Perusahaan	-	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Lamongan	Jumlah perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30 Perusahaan	-	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Lamongan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB), Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek	50 Laporan	40.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Lamongan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB), Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek	50 Laporan	40.000.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah penyelesaian perselisihan kerja	10 Perselisihan Kerja	230.000.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah penyelesaian perselisihan kerja	10 Perselisihan Kerja	230.000.000	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Perselisihan yang dicegah	2 Perkara	110.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Perselisihan yang dicegah	2 Perkara	110.000.000	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	40.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	40.000.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Non Afiliasi	Kab. Lamongan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan serikat Pekerja yang diverifikasi	32 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Non Afiliasi	Kab. Lamongan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan serikat Pekerja yang diverifikasi	32 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	40.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	40.000.000	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	20.580 Orang	40.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Lamongan	Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	20.580 Orang	40.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kab. Lamongan									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Kab. Lamongan									
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Lamongan	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	64,73%	95.000.000	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Lamongan	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	64,73%	95.000.000	



No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah calon transmigran yang ditempatkan	10 KK	95.000.000	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah calon transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	10 KK	95.000.000	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	10 KK	75.000.000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	10 KK	75.000.000	Perlu adanya penambahan tenaga pendamping calon transmigran yang sebelumnya 2 orang menjadi 4 orang
	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Lamongan	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	20 KK	20.000.000	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Lamongan	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	20 KK	20.000.000	Perlu adanya penambahan lokasi penyuluhan guna pemerataan informasi tentang Transmigran
	JUMLAH				9.332.636.922	JUMLAH				9.332.636.922	

**2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari para Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Sekretariat.

Dinas Tenaga Kerja sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Akan tetapi dalam Renja ini tidak ada program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

**Tabel T-C. 32**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU**  
**KEPENTINGAN TAHUN 2023 KABUPATEN LAMONGAN**

Nama PD : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>		

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

No	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
<b>Nasional</b>			
1.	Mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional	Kemennaker	
2.	Membangun Integrasi, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja	Kemennaker	
3.	Mengembangka program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan	Kemennaker	
4.	Mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor formal	Kemennaker	
5.	Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan	Kemennaker	
<b>Provinsi</b>			
1.	Optimalisasi Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi beserta Uji Sertifikasi Kompetensi	Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	
2.	Menyesuaikan jurusan di BLK dengan metode Eliminate, Reduce, Raise dan Create secara bertahap dan berkelanjutan agar bisa sesuai dengan perkembangan Industri maupun perkembangan teknologi industri bukan hanya pada situasi sekarang serta memprediksi perkembangan teknologi di masa depan.	Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	

3.	Link and match antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi angkatan kerja melalui Bursa Kerja Serta Optimalisasi datasebaran sektor lapangan usaha yang akan berkembang di daerah wilayah Kabupaten Lamongan Serta data analisa jabatan tentang pekerjaan yang terdestrupsi akibat globalisasi Transformasi digital serta distrupsi di pasar kerja (rev. industri 4.0).	Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	
4.	Pengukuran pertumbuhan produktivitas perusahaan menengah dan wirausaha baru	Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	
5.	Peningkatan taraf ekonomi transmigran di daerah penempatan dengan cara penambahan skill baru pada waktu pelatihan pra	Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	

Strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan misi pertama ( I ) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk **“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan daerah”**. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara-cara dan kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis secara efektif dan efisien.

Perencanaan strategis mengagendakan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat dan daya saing melalui upaya peningkatan kinerja birokrasi dan manajemen publik. Strategi pembangunan daerah akan diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan disusun secara komprehensif agar dapat mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Oleh karena itu, melalui arah kebijakan dan strategi dapat dijelaskan secara sistematis dan tetap menjadi rujukan dalam setiap jalannya kegiatan pemerintahan selama 5 tahun. Perumusan strategi didasarkan pada kriteria:

- 1) Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;

- 3) Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini.

Visi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan keselarasan dan harmonisasi dengan arah kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RPJPD periode ke 4 Tahun 2005-2025 dan RTRW Tahun 2020-2039 serta mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Lamongan maka Visi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yakni:

#### **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Terwujudnya**, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan Lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
2. **Kejayaan**, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi berbasis potensi unggulan, sehingga terwujudnya kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
3. **Berkeadilan** adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan

pendapat masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026, **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”** ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut.

**Misi 1**

**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah**

**Misi 2**

**Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman**

**Misi 3**

**Mewujudkan Infrastruktur handal dan berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan**

**Misi 4**

**Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera Religius Berbudaya, Aktif, dalam Pembangunan, serta Lingkungan yang Aman dan Tenram**

**Misi 5**

**Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis, serta memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi**

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (lima) dan Tujuan dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- |           |  |
|-----------|--|
| 1. Misi 1 | : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan daerah.     |
| Tujuan    | : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi secara Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan. |

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan pembangunan dalam bidang Tenaga Kerja mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Nilai IKM Internal Dinas Tenaga Kerja**
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentasi akurasi proyeksi indikator dalam Rencana Tenaga Kerja**
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, Peningkat produktifitas tenaga kerja.**
4. Program Penempatan Tenaga Kerja; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota.**
5. Program Hubungan Industrial; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase Perusahaan yang menerapkan UU bidang Ketenagakerjaan.**
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya.**

Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra 2021-2026) dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehubungan dengan hal tersebut maka pada Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan merencanakan 6 (enam) Program yang berkaitan dengan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Dari Program tersebut diimplikasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - 1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 1.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 1.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 1.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1.5.1. Pengadaan Mebel
    - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 1.6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



- 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - 1.1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
    - 1.1.1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
- 3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - 1.1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
    - 1.1.1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi
    - 1.1.2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
    - 1.1.3. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
  - 1.2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
    - 1.2.1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
  - 1.3. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
    - 1.3.1. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
  - 1.4. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.4.1. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 4. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - 1.1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.1.1. Pelayanan Antar Kerja
    - 1.1.2. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
    - 1.1.3. Perluasan Kesempatan Kerja
  - 1.2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
    - 1.2.1. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
    - 1.2.2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
    - 1.2.3. Job Fair/Bursa Kerja
  - 1.3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota
    - 1.3.1. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)
    - 1.3.2. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
    - 1.3.3. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan

- 1.4. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.4.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - 1.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.1.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
    - 1.1.2. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
  - 1.2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.2.1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.2.2. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - 1.1. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
    - 1.1.1. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
    - 1.1.2. Penyuluhan Transmigrasi

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2023 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel T-C. 33  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat DaerahTahun 2023  
dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lamongan

Nama PD : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7.548.707.037				12.109.740.200
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Internal DISNAKER	Dinas Tenaga Kerja	80,00%	5.396.707.937	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		81,00%	6.876.240.200
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	9 dokumen	142.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		13 Dokumen	220.000.000
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	4 dokumen	37.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 dokumen	55.000.000
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Tenaga Kerja	1 dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 dokumen	11.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Tenaga Kerja	3 laporan	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 laporan	22.000.000
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Tenaga Kerja	5 laporan	105.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 laporan	132.000.000
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	Dinas Tenaga Kerja	100%	3.631.249.853	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	4.518.937.000
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Tenaga Kerja	35 Orang	3.607.249.853	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		35 Orang	4.386.937.000
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas Tenaga Kerja	3 laporan	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 laporan	12.000.000
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Dinas Tenaga Kerja	3 laporan	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 laporan	12.000.000
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	100%	102.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	134.000.000
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Dinas Tenaga Kerja	62 paket	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		62 Orang	25.300.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dinas Tenaga Kerja	16 Orang	52.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		21 Orang	57.700.000
2	07	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	Dinas Tenaga Kerja	25 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		25 Orang	51.000.000
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Dinas Tenaga Kerja	100%	140.432.884	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	169.831.200
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja	18 paket	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		18 paket	16.500.000
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja	27 paket	39.432.884	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		27 paket	49.500.000
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja	5 paket	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 paket	16.500.000
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja	2 dokumen	11.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 dokumen	12.100.000
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Tenaga Kerja	80 laporan	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		85 laporan	75.231.200
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lamongan	100%	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	121.000.000
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Lamongan	6 unit	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6 unit	11.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Lamongan	2 unit	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		15 unit	110.000.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lamongan	100%	1.143.525.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	1.382.472.000
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Lamongan	3 laporan	297.729.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 laporan	450.000.000
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Lamongan	75 laporan	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		75 laporan	40.000.000
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Lamongan	14 laporan	805.796.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		14 laporan	892.472.000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lamongan	100%	201.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	330.000.000
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Lamongan	2 unit	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 unit	132.000.000
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Kab. Lamongan	14 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		14 unit	33.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Lamongan	3 unit	121.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 unit	165.000.000
2	07	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentasi akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>88,87%</b>	<b>50.000.000</b>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		<b>88,88%</b>	<b>121..000.000</b>
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Penyusunan dokumen Evaluasi Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Lamongan	1 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 dokumen	121.000.000
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro	Kab. Lamongan	35 Perusahaan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		40 Perusahaan	121.000.000
2	07	03			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>1,36%</b>	<b>1.224.000.000</b>	DBH CHT, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		<b>1,37%</b>	<b>2.987.500.000</b>
						<b>Peringkat produktifitas tenaga kerja</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>44.267</b>				<b>45.595</b>	
2	7	3	2		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi	Kab. Lamongan	160 orang	1.144.000.000	DBH CHT, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		192 orang	2.332.500.000
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Kab. Lamongan	160 orang	1.075.000.000	DBH CHT, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		192 orang	2.100.000.000
					POKIR				34.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada Tahun n	Kab. Lamongan	1 Lembaga	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Lembaga	157.500.000
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	Kab. Lamongan	1 unit	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8 unit	75.000.000
2	7	3	2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang memiliki perizinan	Kab. Lamongan	50 Lembaga	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50 Lembaga	60.000.000
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	Kab. Lamongan	50 Lembaga	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50 Lembaga	60.000.000
2	7	3	2		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat	Kab. Lamongan	20 Perusahaan	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		20 Orang	185.000.000
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kab. Lamongan	20 Perusahaan	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		20 Orang	185.000.000
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	Kab. Lamongan	7 perusahaan kecil	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7 perusahaan kecil	360.000.000
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kab. Lamongan	2 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	360.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Kab. Lamongan	73,21%	748.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		74,05%	1.205.000.000
2	7	4	2		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja	Kab. Lamongan	1 Pelayanan	85.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Pelayanan	230.000.000
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Lamongan	100 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100 Orang	50.000.000
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan penyuluhan dan Bimbingan jabatan	Kab. Lamongan	0 Orang	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0 Orang	50.000.000
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	Kab. Lamongan	10 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Orang	30.000.000
2	07	04	2.01	05	Perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Kab. Lamongan	20 orang	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Untuk menambah lokasi pelatihan Tenaga Kerja Mandiri	20 orang	50.000.000
2	7	4	2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	Kab. Lamongan	2.000 pencaker	485.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2.000 pencaker	675.000.000
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lamongan	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	175.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab. Lamongan	30 Orang	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2.000 leaflet, pamflet	150.000.000
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Kab. Lamongan	2.000 orang	310.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2.000 pencaker	350.000.000
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi	Kab. Lamongan	93 Orang	153.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		125 Orang	150.000.000
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Kab. Lamongan	30 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Berdasarkan UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada calon PMI yang dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah swasta yang terakreditasi	45 orang	82.500.000

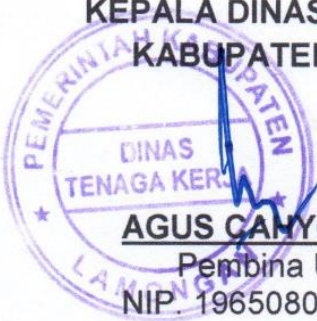
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani	Kab. Lamongan	48 Orang	23.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Perlunya menambah anggaran untuk pelayanan dan penanganan PMIB. Proyeksi pada tahun 2023 akan terdapat peningkatan CPMI seiring dengan dibukanya negara penempatan PMI	60 Orang	32.500.000
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja MigranIndonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	Kab. Lamongan (desa kantong PMI)	15 Orang	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terdapat 979 orang PMI yang pulang ke Lamongan pada tahun 2021 (yang terdata di Disnaker) dan tidak bisa kembali bekerja lagi ke luar negeri, sehingga menyebabkan meningkatnya pengangguran	20 Orang	35.000.000
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan perpanjangan IMTA di Kabupaten Lamongan	Kab. Lamongan	50 Orang	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50 Orang	50.000.000
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi perusahaan yang mempekerjakan TKA	Kab. Lamongan	50 Orang	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50 Orang	50.000.000
2	7	5			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan</b>	<b>Kab. Lamongan</b>	<b>60,08%</b>	<b>130.000.000</b>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		<b>60,09%</b>	<b>920.000.000</b>

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	Kab. Lamongan	30 Perusahaan	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		30 Perusahaan	420.000.000
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	Kab. Lamongan	50 Perusahaan	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50 Perusahaan	260.000.000
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Lamongan	30 Perusahaan	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		30 Perusahaan	80.000.000
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB), Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek	Kab. Lamongan	50 Laporan	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50 Laporan	80.000.000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan kerja	Kab. Lamongan	10 Perselisihan Kerja	55.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Perselisihan Kerja	500.000.000
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Kab. Lamongan	2 Perkara	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Perkara	200.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kab. Lamongan	10 Perkara	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Perkara	70.000.000
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan serikat Pekerja yang diverifikasi	Kab. Lamongan	32 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		32 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Kab. Lamongan	1 Lembaga	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Lembaga	100.000.000
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Lamongan	50 Orang	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50 Orang	80.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	Kab. Lamongan	64,73%	95.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		64,74%	165.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang ditempatkan	Kab. Lamongan	5 KK	95.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 KK	165.000.000
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	Kab. Lamongan	5 KK	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Perlu adanya penambahan tenaga pendamping calon transmigran yang sebelumnya 2 orang menjadi 4 orang	10 KK	115.000.000
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	Kab. Lamongan	20 KK	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Perlu adanya penambahan lokasi penyuluhan guna pemerataan informasi tentang Transmigran	40 KK	50.000.000
					JUMLAH				7.643.707.937				12.274.740.200

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN LAMONGAN



AGUS CANYONO, S.E., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650808 199503 1 002

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan Ketenagakerjaan dan Ket transmigrasian sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

#### **5.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN**

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang mandiri, berdaya saing, harmonis, dan sejahtera. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Tahun 2023, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

#### **5.2 RENCANA TINDAK LANJUT**

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, selanjutnya Renja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA)



dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun demikian berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, masih terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Permasalahan dan Kendala Utama yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut:
  - a. Fasilitas prasarana dan pelatihan masih belum lengkap
  - b. Kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta Penciptaan dan pengembangan perluasan kesempatan kerja belum optimal
  - c. Keberadaan BLK di Lamongan masih belum didukung tenaga pelatih (instruktur) sendiri sehingga masih bekerja sama dengan pihak ketiga (Instruktur LPKS) atau belum mempunyai Instruktur PNS.
  - d. Penyaluran eks peserta pelatihan di BLK ke perusahaan kurang optimal.
  - e. Masih belum maksimalnya LKS Bipartit Perusahaan dalam penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja di perusahaan
2. Strategi Pemecahan Masalah untuk Tahun Mendatang.

Berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, agar di tahun mendatang peningkatan kinerja lebih meningkat lagi capaiannya, guna lebih mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka terhadap program-program yang telah ditetapkan dan dianggarkan khususnya terkait kebutuhan dasar masyarakat (sebagaimana RPJMD 2021 - 2026), disarankan perencanaannya lebih dimantapkan sehingga dapat terlaksana dengan baik dan diharapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan lebih memperhatikan alokasi anggaran Ketenagakerjaan dalam rangka menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan mengurangi Kemiskinan.

Lamongan, 29 Juli 2022

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN LAMONGAN**



**AGUS CANYONO, S.E., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650808 199503 1 002